

## Pendampingan Pemadanan NIK Sebagai NPWP Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai PT. Asuransi Intra Asia Cabang Medan

Rolita C. Purba<sup>1</sup>, Fransiska Tiurma Damanik<sup>2</sup>, Frida L Saragih<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia

\*penulis korespondensi: [rolita.purba197ta@gmail.com](mailto:rolita.purba197ta@gmail.com)

**Abstrak.** Pemadanan NIK sebagai NPWP sangat penting untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia, agar terdapat nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra pendampingan 100% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik. Sedangkan hasil pasca pendampingan 100% menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik.

**Abstract.** Matching NIK as NPWP is very important to support Indonesia's one data policy, so that there is a single identity number that is standardized and integrated in tax administration services. The result of this activity was that during pre-mentoring 100% stated that they did not know and understand well the matching of NIK as NPWP both in theory and practice. Meanwhile, the post-mentoring results were 100% stating that they knew and understood well the matching of NIK as NPWP both in theory and practice.

### Historis Artikel:

Diterima : 21 Januari 2025

Direvisi : 01 Februari 2025

Disetujui : 07 Februari 2025

### Kata Kunci:

Pemadanan NIK, NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat dibebani dengan beragam nomor identifikasi. Ditjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan NIK, DJP Kemenkeu menetapkan NPWP, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengatur Nomor Paspor, belum lagi ada SIM, nomor anggota BPJS, rekening bank, nomor telepon, dan banyak lainnya. Secara keseluruhan, seseorang bisa memiliki hingga 40 nomor identitas. Bagi pemerintah, kondisi ini menyulitkan pengelolaan data kependudukan, sementara bagi masyarakat, ini menjadi tantangan tersendiri karena harus mengingat begitu banyak angka untuk berbagai keperluan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yakni DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dalam mendukung program Satu Data Indonesia melalui pemadanan NIK sebagai NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PMK No 112/PMK/03/2022, NIK sebagai NPWP mulai digunakan sejak tanggal 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk sesuai dengan ketentuan PMK-112/PMK.03/2022 yang telah diubah dengan PMK 136 Tahun 2023 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan nomor identitas tunggal (*Single Identification Number*) yang terstandarisasi dan terintegrasi khususnya dalam pelayanan administrasi perpajakan (Meila, Putri, & Azzahra, 2024)

Kebijakan satu data integrasi NIK menjadi NPWP, dinamakan sistem *Single Identity Number* (SIN). Sistem *Single Identity Number* (SIN) merupakan sistem yang berisi nomor identifikasi pribadi tetapi juga informasi lain terkait data keluarga, kepemilikan properti, data kepolisian, transaksi perbankan, pajak, dan lainnya. Sistem *Single Identity Number* (SIN) ini, diharapkan mampu mengurangi identitas yang beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penting untuk diingat untuk mengurangi biaya-biaya terkait perpajakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya yang mungkin timbul selama pemrosesan (Ayuningtyas & Furqon, 2023)

Jika melihat manfaat bagi DJP dan Penerimaan Negara, PPAATK memperkirakan jika *shadow economy* di Indonesia mencapai 8,3% sampai 10 % dari PDB, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak

bertanggungjawab untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan bisa membantu mengurangi *shadow economy*, apalagi jika dimasa mendatang bisa diterbitkan aturan pembatasan transaksi tunai, misalnya transaksi tunai maksimal 100 juta. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data OECD tingkat tax ratio Indonesia saat ini adalah sebesar 10,1% dari PDB, masih dibawah rata-rata negara- negara di kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 19% dari PDB. Integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dipastikan akan meluaskan basis penerimaan pajak sehingga dalam jangka menengah dan panjang diharapkan penerimaan pajak akan meningkat (Indriani, et al., 2023)

### **Analisis Situasional**

Perubahan regulasi dan kebijakan pajak yang sering terjadi menyebabkan ketidakpastian dan sulit dipahami oleh wajib pajak. Selain itu fakta di tengah masyarakat menunjukkan bahwa minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena kesibukan masyarakat dengan aktivitasnya di dunia kerja atau kegiatan keseharian lain yang terkadang membuat masyarakat lupa akan kewajiban membayar pajak. Problem lain adalah karena masyarakat cenderung lalai membayar pajak dikarenakan proses pembayaran yang panjang sehingga menyita banyak waktu, pikiran, dan tenaga (Firdaus, Fahrudin, Prasetyo, Anwari, & Faizin, 2023)

PT. Asuransi Intra Asia Cabang Medan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan asuransi kerugian. Komitmen perusahaan untuk mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan dan didukung oleh produk yang inovatif serta menawarkan berbagai solusi asuransi yang komprehensif meliputi cakupan layanan bagi nasabah yang lebih luas, mulai dari individu, perusahaan hingga pasar komersial, serta membangun dan membina hubungan jangka panjang dan kemitraan yang erat disegala situasi. Melalui observasi awal yang dilakukan pada mitra teridentifikasi masalah yang dihadapi mitra yaitu kurangnya pengetahuan akan kewajiban lapor pajak yang berlaku serta kurangnya informasi ketentuan baru dalam dunia perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Pendampingan Pemadanan NIK Sebagai NPWP. Dimana nantinya melalui pendampingan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para peserta dalam melakukan lapor pajak setiap tahunnya.

### **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan Pendampingan Pemadanan NIK Sebagai NPWP difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam Pendampingan Pemadanan NIK Sebagai NPWP Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai PT. Asuransi Intra Asia Cabang Medan adalah metode, ceramah, demonstrasi dan sesi tanya jawab.

Sedangkan evaluasi dilakukan pada awal dan akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruh peserta pendampingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Pendampingan	Pasca Pendampingan	Uraian	Persentase (%)
Pendampingan Pemadanan NIK Sebagai NPWP Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai PT. Asuransi Intra Asia Cabang Medan	Belum mengetahui dan memahami dengan baik terkait pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik	Memberikan edukasi terkait pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik	100%

### Pembahasan

Kegiatan pendampingan pemadanan NIK sebagai NPWP berjalan baik dan lancar. Kegiatan ini dihadiri 17 peserta. Kegiatan terlaksana secara interaktif dan para peserta pendampingan juga sangat antusias terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta serta keikutsertaan peserta dalam menanggapi jawaban pemateri dan pertanyaan dari peserta lain. Keaktifan pemateri yang memberikan pertanyaan pada peserta terkait sejauhmana mereka mengenal dan memahami pemadanan NIK sebagai NPWP melalui *pre test* yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra pendampingan 100% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik.

Luaran dari kegiatan ini berdasarkan hasil *post test* menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik.

Diakhir kegiatan pemateri menutup dengan memberikan pesan kepada peserta diharapkan dengan diadakannya pendampingan ini dapat meningkatkan kesadaran para peserta dalam melakukan lapor pajak setiap tahunnya.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan Pendampingan Pemadanan NIK Sebagai NPWP Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai PT. Asuransi Intra Asia Cabang Medan, disaat pra pendampingan 100% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik. Sedangkan hasil pasca pendampingan menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik dengan baik tentang pemadanan NIK sebagai NPWP baik secara teori maupun praktik.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan dengan diadakannya pendampingan dapat meningkatkan kesadaran para peserta dalam melakukan lapor pajak setiap tahunnya.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada PT. Asuransi Intra Asia Cabang Medan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi NIK Menjadi NPWP Dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64-71.
- Firdaus, Fahrudin, A., Prasetyo, T. A., Anwari, Z., & Faizin, M. K. (2023). Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 61-70.
- Indriani, A., Modjaningrat, R., Saminem, Sukardi, Syamsiah, N., & Kharie, S. M. (2023). Sosialisasi Perpajakan Peadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPH Orang Prbadi Dan UMKM. *JABB : Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 821-835.
- Meila, K. D., Putri, A., & Azzahra, R. (2024). Pendampingan Relawan Pajak Dalam Peadanan NIK-NWP 16 Digit Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 2463-2469.
- Nurcholis, M. (2019). *Pendampingan Penyuluhan Hukum Waris Islam*. Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang.